

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MEKAR JAYA  
KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN  
POHUWATO**

Oleh :

**MARWIN S. HASAN  
NIM : E21 17 237**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
PADA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN  
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

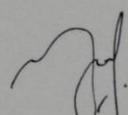
Oleh

**MARWIN S. HASAN  
E21.19.237**

**SKRIPSI**

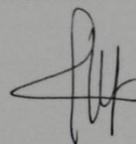
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo, 08 November 2021

**PEMBIMBING I**



**TAMSIR, SE., MM**  
NIDN : 0920057403

**PEMBIMBING II**



**NG SYAMSIAH, B, SE., MM**  
NIDN : 0921018003

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**MARWIN S. HASAN  
E21.19.237**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

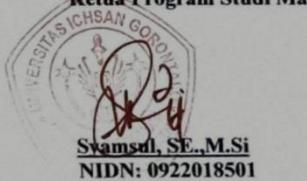
1. Sulaiman, SE., MM
2. Sulerski Monoarfa, S.Pd., M.Si .....
3. Haris Hasan, SE., MM .....
4. Tamsir, SE., MM .....
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM .....

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ekonomi**



**Ketua Program Studi Manajemen**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

".Pendidikan adalah kemampuan, dan untuk mendengarkan  
Segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan  
Tempramen atau rasa percaya diri.."

( Marwin Hasan )

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya  
Yang selalu mendoakan, dan memberikan nasihat kepada saya agar bias menjadi  
orang sukses.

Suamiku dan adikku yang selalu mendukung, serta sahabat yang memberikan  
semangat agar tidak mudah menyerah dan putus asa sampai  
saya bias menyelesaikan skripsi ini dengan baik

ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBAH ILMU

2021

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 November 2021

Versi ~~Maenabut~~ Pernyataan



Marwini S. Hasan

E21.19.237

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Symasiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Suharto Kahala, Selaku Kepala Desa pada Desa Mekar Jaya, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga

yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Rawi, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 November 2021

( **Penulis** )

## **ABSTRACT**

**MARWIN HASAN. E21192237. THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE FINANCIAL MANAGEMENT AT MEKAR JAYA VILLAGE, DUHIADAA SUBDISTRICT, POHuwATO DISTRICT**

*The role of the internal control system is crucial to creating an efficient, effective, and reliable government. The purpose of this study is to know and analyze the effect of the internal control system on the financial management at Mekar Jaya Village, Duhiadaa Subdistrict, Pohuwato District. This study applies the type of quantitative research. Based on the results of data processing using SPSS-16 and discussion, it is found that the F-count is  $4.458 > \text{sig. of } 0.049$ , which means that there is a correlation between the internal control system (X) with the village financial management (Y) at Mekar Jaya Village, Duhiadaa Subdistrict, Pohuwato District by 4,458 and is significant.*

*Keywords:* internal control system, village financial management



## ABSTRAK

### MARWIN HASAN. E21192237. PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Peranan dari sistem pengendalian internal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kuantitatif. Dari hasil olahan data dengan menggunakan SPSS-16 dan pembahasan, ditemukan bahwa dengan F hitung sebesar  $4,458 > \text{sig.}$  sebesar 0,049, itu bermakna bahwa hubungan antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan desa



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	6
2.1.Desa .....	6
2.1.1. Pengertian Desa .....	6

2.1.2. Pemerintah Desa .....	7
2.1.3. Otonomi Desa .....	8
2.2. Sistem Pengendalian Internal .....	11
2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal .....	11
2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal .....	12
2.2.3. Komponen Pengendalian Internal .....	13
2.2.4. Unsur Pengendalian Internal .....	14
2.2.5. Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Internal .....	16
2.3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
2.3.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
2.4. Kerangka Pikir .....	29
2.5. Hipotesis .....	30
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Objek Penelitian.....	31
3.2. Metode Penelitian .....	31
3.2.1. Desain Penelitian .....	31
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian .....	32
3.2.3. Populasi dan Sampel .....	33
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	35
3.2.5. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif .....	39
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel SPI (X) .....	40
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan (Y) .....	43
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	52
<b>LAMPIRAN</b>	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian .....	32
Tabel 3.2. Tabel Skala Likert .....	34
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden .....	39
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Variabel SPI .....	40
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Variabel SPI .....	41
Tabel 4.4. Rekapan Tanggapan Responden Variabel SPI .....	43
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Keuangan .....	44
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Keuangan .....	45
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Keuangan .....	46
Tabel 4.8. Rekapan Tanggapan Responden Variabel Pengelolaan Keuangan..	48
Tabel 4.9. Tabel <i>Coefficients</i> .....	48
Tabel 4.10. Tabel <i>Model Summary</i> .....	49
Tabel 4.11. Tabel ANOVA .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2. Kerangka Pikir .....	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Jadwal Penelitian .....	54
Lampiran 2. Kuisioner .....	55
Lampiran 3 Tabulasi Data .....	59
Lampiran 4 Frequency Variabel Y .....	61
Lampiran 5 Frequency Variabel X .....	65
Lampiran 6 Output Regression .....	68
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian .....	69
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian .....	70
Lampiran 9 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	71
Lampiran 10 Hasil Turnitin .....	72
Lampiran 11 Curriculum Vitae .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara resmi memberikan wewenang dan kebebasan bagi Desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri. Setiap desa di Indonesia diberikan dana yang ditransfer langsung dari APBN. Pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan anggaran dana Desa sebesar Rp 960,59 juta per desa. Untuk bobot Alokasi Dasar sebesar 69%, Alokasi Afirmasi 1,5%, dan Alokasi Formula 28%, dan Alokasi Kinerja 1,5% (Jakarta, Beritasatu.com). Dana yang diberikan pemerintah kepada Desa sangat besar maka pemerintah perlu memperhatikan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa tersebut sehingga tidak terjadi banyak kebocoran dan kecurangan. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) pemerintah desa harus meningkatkan akuntabilitas, transparasi, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan desa.

Dalam menciptakan *good village governance* dibutuhkan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai. Pengendalian internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Peranan dari SPI sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Organisasi pemeritahan yang telah

memiliki SPI cenderung lebih efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi. Terbukti kelemahan SPI dapat berdampak pada banyaknya laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kecurangan dalam mengelola dana Desa.

Pada tahun 2019 ditemukan kurang dari 100 kasus dari total 74.957 desa. Dari 100 kasus tersebut, hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hukum (Liputan6.com, Jakarta). Peran SPI ialah sebagai alat pemerintah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Kepatuhan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan SPI sangat dibutuhkan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Peran SPI dalam pemerintahan ialah memberikan landasan untuk akuntabilitas dan pengendalian manajemen dalam menjalankan pemerintahan, mencegah pencurian dan kecurangan, serta meningkatkan trasparansi dan efisiensi (INTOSAI GOV 9100, 2004). Menurut Ionescu (2016) SPI bisa berjalan secara efisien dengan mengutamakan tujuan yaitu perlindungan dana dan anggaran publik, penegakan peraturan dan hukum, pengembangan sistem akuntansi, pencegahan kecurangan dan korupsi, penerapan teknik baru untuk memverifikasi data dan informasi keuangan dalam administrasi publik.

PP No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, trasparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden RI mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem

pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No.9 Tahun 2014 ialah pemerintah saat ini ingin menpercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban ini menimbulkan banyak permasalah pada pemerintah desa karena tingkat sumber daya manusia yang ada pada desa belum bisa sepenuhnya menerima SAP.

Melihat tujuan awal dari SPIP yang salah satunya adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, SPIP memiliki dua tujuan dasar yang paling utama yaitu berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan bagian utama dari reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Singkatnya semakin baik implementasi SPIP maka akan memberikan pengaruh positif pada kualitas Opini

yang dikeluarkan oleh auditor BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam SPI harus menjadi acuan dan menjadi unsur utama dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

**“Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Dhuhiadaa Kabupaten Pohuwato.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Dhiadaa Kabupaten Pohuwato”?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Dhuhiadaa Kabupaten Pohuwato.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi Kantor Desa Mekar Jaya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

### b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

### c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

### d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Desa**

##### **2.1.1. Pengertian Desa**

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

## **2.1.2. Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa.

Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **2.1.3. Otonomi Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu

komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar

rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

## **2.2. Sistem Pengendalian Internal**

Untuk dapat memahami bagaimana sistem pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan kas, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal, tujuan sistem pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal dan komponen pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai.

### **2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Anggreini (2012:10) pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem

pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik Chung, (2015:11).

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer Mulyadi (2014:163).

## **2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut :

### 1. Keandalan laporan keuangan

Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### 2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlakuSuatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Mulyadi (2014:163), mengemukakan bahwa, tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjagakekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

### **2.2.3 Komponen Pengendalian Internal**

Menurut Kumaat (2011:16), sejalan dengan waktu, semakin didasari adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada *historical/current* data, dan kelemahankelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak

tahun 1992 COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) memperkenalkan kerangka pengendalian yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian melingkupi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi.

2. Penilaian risiko

Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis.

3. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi keterbatasan serta kesalahan.

4. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan manajemen.

5. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

#### **2.2.4. Unsur Pengendalian Internal**

Mulyadi (2014:164), berpendapat bahwa, unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.  
Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
  - a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
  - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a) Penggunaan formulir bermotor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
- b) Pemeriksaan mendadak
- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi
- d) Perputaran jabatan
- e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
- f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
- g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-s unsur sistem pengendalian internal yang lain

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

#### **2.2.5. Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Internal**

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dijadikan acuan dalam bentuk indikator-indikator penilaian yang bersumber dari PP No. 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan Pengendalian.**

Untuk mengukur tingkat efektifitas lingkungan pengendalian, indikator yang digunakan adalah:

- a) Organisasi adalah mencakup proses pembentukan organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan struktur dan rincian tanggung jawab.
- b) Sumber daya manusia adalah sub sistem dalam suatu organisasi sebagai upaya agar para pegawai dapat dimanfaatkan secara efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
- c) Kebijakan adalah ketentuan hukum sebagai landasan bagi pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan.

- d) Prosedur adalah rangkaian dari beberapa perintah atau aturan yang mewakili aktivitas yang dilakukan dengan peralatan dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan pimpinan.

## **2. Penilaian Resiko.**

Untuk mengukur tingkat efektifitas bagaimana menangani semua resiko dalam pencapaian tujuan organisasi, indikator yang digunakan adalah:

- a) Identifikasi Resiko, adalah melaksanakan identifikasi tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan titik kritis serta menyusun daftar resiko.
- b) Penanganan Resiko adalah upaya yang akan dilakukan untuk menangani resiko yang telah teridentifikasi, untuk mengeliminasi penyebab terjadinya resiko.

## **3. Pengendalian.**

Untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan pengendalian, indikator yang digunakan adalah:

- a) Review atas Kinerja adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi oleh seluruh personil serta untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
- b) Pemisahan Fungsi adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

## **4. Informasi dan Komunikasi.**

Untuk mengukur tingkat efektifitas informasi dan komunikasi, indikator yang digunakan adalah:

- a) Pencatatan adalah untuk menjamin keandalan proses pengolahan data menjadi keluaran yang bebas dari kekeliruan dan kesalahan yang fatal/signifikan.
- b) Pelaporan adalah kebijakan, prosedur, teknik , dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

## **5. Pemantauan dan Pengendalian Intern.**

Untuk mengukur tingkat efektifitas pemantauan dan pengendalian intern, in dikator yang digunakan adalah:

- a) Pemantauan yang berkelanjutan adalah Penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah.
- b) Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- c) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit adalah Penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya sesuai ketentuan.

### **2.3. Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

**a. Perencanaan.**

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi

Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

**b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan

2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan ataupelaksanaandari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

### c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
  - Buku kas umum
  - Buku Kas Pembantu Pajak dan
  - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

#### **d. Pelaporan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**e. Pertanggungjawaban**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan

- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

#### **f. Pengawasan**

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah danadigunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

- 1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

### **2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.**

#### **1. Transparan**

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

## 2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

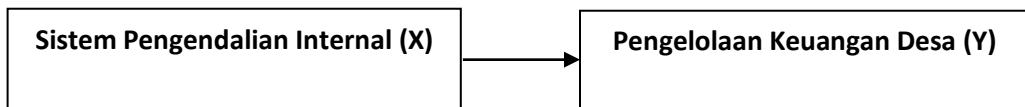
### **3. Partisipatif**

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

### **2.4. Kerangka Pikir**

Sugiyono (2008:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis

menggambarkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



**Gambar 2.1. : Kerangka Pikir**

## **2.5. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato”.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

### **3.2.2. Operasional Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal (X).

**Tabel 3.1**  
**Tabel Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)  (PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014)	1. Transparan  2. Akuntabel  3. Partisipasi	1. Akses Dokumen Pengelolaan Mudah Diperoleh 2. Pengumuman Pengelolaan Transparan 3. Rencana strategi kebijakan 4. Indikator evaluasi Pengelolaan 5. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan 6. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan
Sistem Pengendalian Internal (X)  (PP No. 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan	1. Penilaian Kualitas 2. Standar Kompetensi 3. Identifikasi Resiko. 4. Penanganan Resiko 5. Kebijakan Penganaman Fisik 6. Pengembangan Rencana 7. Informasi Tepat Waktu 8. Pertanggungjawaban Tepat Waktu 9. Tindak Lanjut Hasil Penilaian 10. Reviu Temuan

### **3.2.3. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 20 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

### **3.2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. *Library Research*

*Library research* bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. *Field Research*

*Field reserach* bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh sistim pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena

sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

**Tabel 3.2.**

**Skala Likert**

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

### **3.2.5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### **1. Analisis Regresi Sederhana**

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari bentuk secara simultan (bersama-sama) dan parsial (sendiri-sendiri) antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

$Y$  = Variabel dependent (Pengelolaan Keuangan Desa)

$a$  = Koefisien regresi (konstanta)

$b$  = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal

$X$  = Variabel independent Sistem Pengendalian Internal

$\epsilon$  = Pengaruh Variabel Lain

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas.

Menurut Ghazali (2016:97) nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 3. Uji Hipotesis

Uji signifikansi digunakan untuk menguji kewajaran atau kelayakan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dan uji F, Widayat (2002 : 104). Untuk itu uji hipotesis penelitian korelasi parsial digunakan uji t dan korelasi secara simultan uji F.

Analisis data kuantitatif menggunakan program SPSS, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf  $\alpha = 5\%$ .

## **BAB IV**

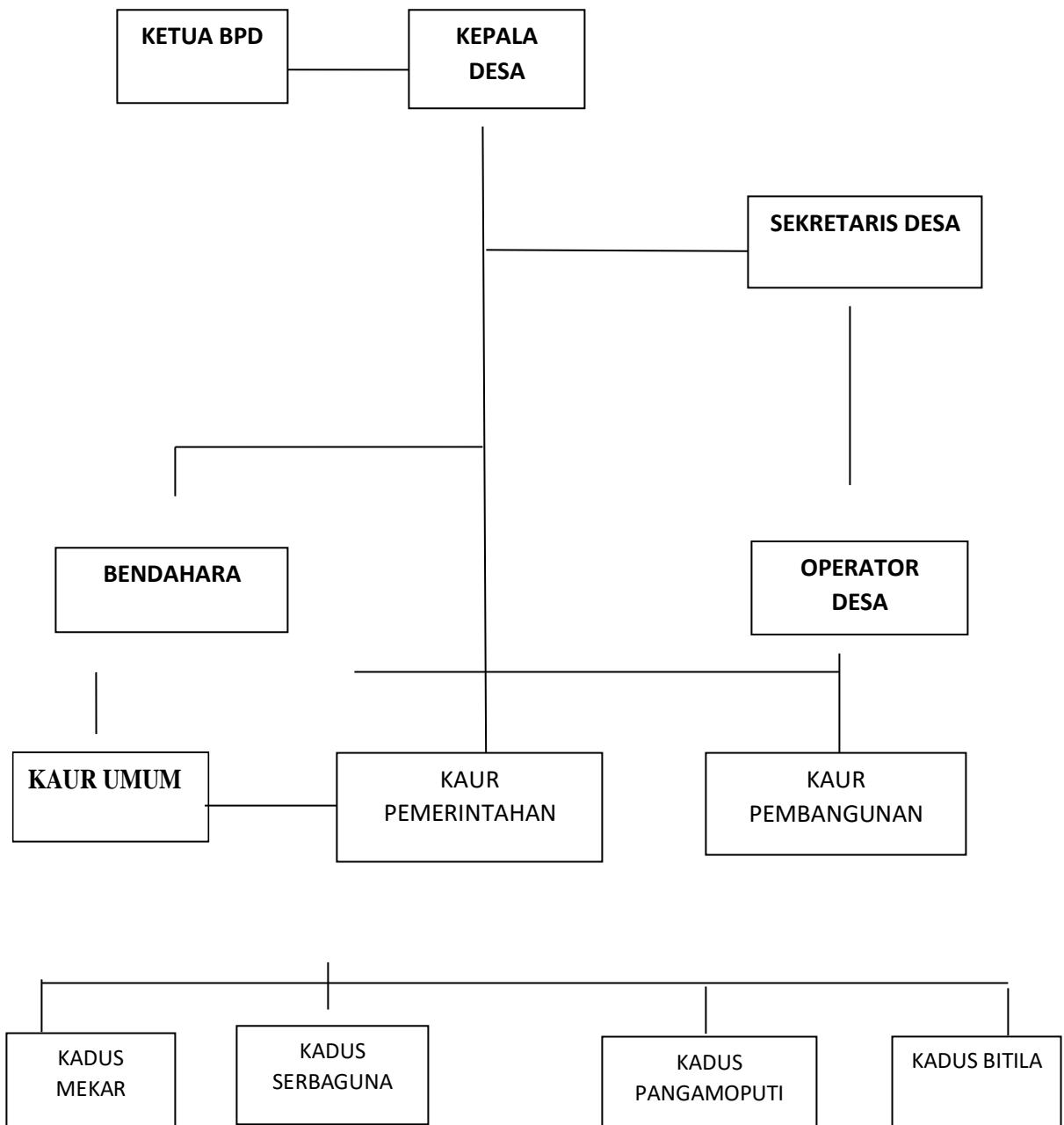
### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara historis Desa Mekar Jaya dibentuk pada Tanggal 6 Maret 2003, merupakan pecahan dari Desa induk yaitu Desa Duhiadaa Kecamatan Marisa Kabupaten Boalemo, mengingat induk Desa tersebut jauh dari jangkauan masyarakat dusun beringin I dan dusun beringin II maka kebutuhan dan pelayanan masyarakat pada masa itu sangat sulit sehingga masyarakat megusulkan melalui badan perwakilan desa ( BPD ) agar dibentuknya desa definitive yang baru, maka hal itu ditindaklanjuti oleh BPD ketingkat Kecamatan Marisa Kabupaten Boalemo.

Mengingat hal tersebut akan diuraikan , maka Desa baru yang diusulkan tersebut dinamakan Desa Mekar Jaya. Menurut kalanagan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu (1980) seorang **Raja Dedipo** telah menitipkan sekeping logam (harta) disebuah pohon kayu, maka pohon kayu tersebut dinamakan upongomoputi, dengan maksud agar masyarakat diimbau untuk memberikan sedekah/zakat dengan hati yang ikhlas. Kemudian nama pohon tersebut dicantumkan dalam salah satu dusun yaitu Dusun **Pangamoputi**, kemudian kalimat tersebut diperhalus dengan sebutan **Mekar Jaya**. Maka berawal dari situlah terjadi sebuah pemekaran desa definitive yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

**Struktur kelembagaan Desa Mekar Jaya**  
**Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato**



**3. TARGET DAN SASARAN**

#### **Gambar 4.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Di Atas Dapat Menjelaskan tentang tugas-tugas dan fungsi bagi setiap perangkat desa. Kepala desa dalam menjalankan semua kebijakan dan programnya, tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa ( BPD ) sebagai lembaga yang mengawasi semua kebijakan dan keputusan kepala desa, termasuk dapat memberikan teguran apabila kebijakan-kebijakan tida berpihak pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk sekretaris desa yang dibantu operator desa bertanggung jawab sepenuhnya membantu kepala desa dalam hal administrasi yang ada di desa, selanjutnta sekretaris desa dapat mewakili kepala desa apabila kepala desa berhalanagn dalam menghadiri hajatan atau lain sebagainya yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif**

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel sistem pengendalian internal (X), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

$$\text{Skor terendah} = \text{Bobot terendah} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 1 \times 20 = 20$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 1 \times 20 = 100$$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$100 - 20$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{100 - 20}{5} = 16$$

5

**Tabel 4.1.**  
**Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden**

Range	Kategori
88 – 104	Sangat Baik
71 – 87	Baik
54 – 70	Kurang Baik
37 – 53	Tidak Baik
20 – 36	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021

#### **4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Intern (X)**

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 10 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4			Item 5		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	80	12	60	60	12	60	60	7	35	35	14	70	70
4	4	16	20	8	32	40	6	24	30	8	32	40	6	24	30
3	0	0	0	0	0	0	2	6	10	5	15	25	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	96	100	20	92	100	20	90	100	20	82	100	20	94	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 4 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 16, sehingga total skor item 1 adalah 96.

Untuk pernyataan tentang Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32, sehingga total skor item 2 adalah 92.

Untuk pernyataan tentang pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 3 adalah 90.

Untuk pernyataan tentang pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor

32 dan 5 responden atau 25% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 4 adalah 82.

Untuk pernyataan tentang kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 5 adalah 94.

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Sistem Pengendalian Intern**

Bobot	Item 6			Item 7			Item 8			Item 9			Item 10		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	14	70	70	9	45	45	8	40	40	14	70	70	11	55	55
4	6	24	30	7	28	35	8	32	40	6	24	30	9	36	5
3	0	0	0	4	12	20	4	12	20	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	85	100	20	84	100	20	94	100	20	91	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 6 adalah 94.

Untuk pernyataan tentang informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 4 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 7 adalah 85.

Untuk pernyataan tentang pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 4 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 8 adalah 84.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 9 adalah 94.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan

diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 10 adalah 91.

**Tabel 4.4.**  
**Rekapan tanggapan Responden**  
**Variabel SPI**

Statistics											
	Sistem Pengendalian Internal	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	904	96	92	90	82	96	94	85	84	94	91

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel sistem pengendalian intern (X) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel sistem pengendalian intern (X) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 90.

#### **4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)**

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 12 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	9	45	45	16	80	80	15	75	75	11	55	55
4	6	24	30	3	12	15	5	20	25	7	28	35
3	5	15	25	1	3	5	0	0	0	2	6	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	84	100	20	95	100	20	95	100	20	89	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 6 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 24 dan 5 responden atau 25% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 1 adalah 80.

Untuk pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 3 responden atau 15% yang menjawab setuju dengan skor 12 dan 1 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 2 adalah 95.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau

75% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 5 responden atau 25% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 3 adalah 90.

Untuk pernyataan tentang penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 89.

**Tabel 4.6. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 5			Item 6			Item 7			Item 8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	9	45	45	12	60	60	9	45	45	9	45	45
4	7	28	35	5	20	25	7	28	35	7	28	35
3	3	9	15	2	6	10	3	9	15	3	9	15
2	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	84	100	20	88	100	20	84	100	20	84	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju

dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28, sehingga total skor item 5 adalah 84.

Untuk pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 5 responden atau 25% yang menjawab setuju dengan skor 20 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 1 responden atau 5% menjawab tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 6 adalah 88.

Untuk pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 3 responden atau 15% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 1 responden atau 5% yang menjawab kurang setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 7 adalah 84.

Untuk pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 7 responden atau 35% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 3 responden atau 15% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 1 responden

atau 5% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 8 adalah 84.

**Tabel 4.7. Tanggapan Responden  
Pada Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Bobot	Item 9			Item 10			Item 11			Item 12		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	80	18	90	90	10	50	50	9	45	45
4	2	8	10	2	8	10	8	32	40	11	44	55
3	2	6	10	0	0	0	2	6	10	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	98	100	20	88	100	20	89	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 2 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 8 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 9 adalah 94.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau

90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 2 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 8, sehingga total skor item 10 adalah 98.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 8 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 2 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 11 adalah 88.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 45% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 11 responden atau 55% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 12 adalah 89.

**Tabel 4.8. Rekapan Tanggapan Responden  
Pada variabel pengelolaan Keuangan Desa**

**Statistics**

	Pengelolaan Keuangan Desa	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y1 2
N Valid		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Missing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		1069	84	95	95	89	84	87	84	84	92	98	88

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan keuangan desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 89.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan pada hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil :

**Tabel 4.9. Coefficients**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.843	17.835		.888	.386
Sistem Pengendalian Internal	.832	.394	.446	2.111	.049

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda  $Y = 15,843 + 0,832X + \epsilon$  dimana nilai constant 15.843 yang berarti jika variabel sistem pengendalian internal di asumsikan sama dengan 0, maka pengelolaan keuangan desa di desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 15.843.

Koefisien variabel sistem pengendalian internal (X) sebesar 0,832 yang bermakna bahwa perubahan variabel sistem pengendalian internal (X) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa sebesar 0,832 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian internal (X) terhadap variabel pengelolaan keuangan desa pada desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato secara simultan, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) berikut ini.

**Tabel 4.10. Model Summary**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 <sup>a</sup>	.198	.154	3.964

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,198 atau 19,8%. Yang berarti bahwa besarnya sistem pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,198. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika sistem pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa pada desa Mekar Jaya Kecamatan

Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebesar 19,8%, sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

### 3. Uji Hipotesis

Uji signifikan digunakan untuk menguji kelayakan hasil penelitian, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.11. ANOVA**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1      Regression	70.056	1	70.056	4.458	.049 <sup>a</sup>
Residual	282.894	18	15.716		
Total	352.950	19			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar  $4,458 > \text{sig.}$  sebesar 0,049 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya hubungan antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa (Y) Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa “Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato” sebesar 0,832 dengan taraf signifikan sebesar 0,049.

#### **5.2. Saran-Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi :

1. Pemerintah Desa harus mempertahankan sistem pengendalian internalnya dalam mengelola keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, Adisty C. (2012). Asuhan Gizi Nutritional Care Process. Yogyakarta
- Chung, N. T., et all. 2015. *Impact of Seasonal Climate Variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia.*
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumaat, Valarey G. (2011). Internal Audit. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset
- Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :
- Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :
- Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. ”*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*”.Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

\_\_\_\_\_, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

\_\_\_\_\_, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

W. J. S. Poerwadarminta 2007.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

## Lampiran 1

### JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2021									
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal dan Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

## Lampiran 2

### KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai **“Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa Kabupaten Pohuwato”** Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

**Marwin S. Hasan**

**NIM F21 19 237**

## **PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER**

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)**

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

## B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X)

No	Pernyataan Indikator Lingkungan Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					
2	Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					

No	Pernyataan Indikator Penilaian Resiko	SS	S	KS	TS	STS
1	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
2	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					

No	Pernyataan Indikator Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kebijakan maupun prosedur pengamanan					

	fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor Desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas				
2	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastuktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi				

No	Pernyataan Indikator Informasi Komunikasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
2	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor Desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya					

No	Pernyataan Indikator Pemantauan dan Pengendalian Intern	SS	S	KS	TS	STS
1	Kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern					
2	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					

### Lampiran 3

#### TABULASI DATA

Z	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)												ml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\frac{1}{1}$	12	
1	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	<b>54</b>
2	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	<b>54</b>
3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	<b>59</b>
4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	<b>56</b>
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	<b>59</b>
6	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	4	4	<b>52</b>
7	3	4	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	<b>52</b>
8	4	5	5	3	5	4	3	3	5	5	4	4	<b>50</b>
9	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	<b>51</b>
10	3	5	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	<b>49</b>
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>60</b>
12	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	<b>50</b>
13	3	4	5	5	4	5	3	4	2	5	3	4	<b>47</b>
14	3	5	5	5	3	5	2	4	2	5	3	4	<b>46</b>
15	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	<b>52</b>
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>60</b>
17	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	<b>56</b>
18	4	5	4	4	3	1	5	4	5	5	5	4	<b>49</b>
19	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	<b>57</b>
20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	<b>56</b>

N	Variabel Sistem Pengendalian Intern (X)										ml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	<b>44</b>
2	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	<b>46</b>
3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	<b>48</b>
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	<b>42</b>
6	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	<b>45</b>
7	5	5	4	3	5	5	3	3	5	4	<b>42</b>
8	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	<b>44</b>
9	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	<b>43</b>

10	5	4	4	3	5	5	3	4	5	5	<b>43</b>
11	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	<b>46</b>
12	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	<b>45</b>
13	4	5	4	3	5	5	5	5	5	4	<b>45</b>
14	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	<b>44</b>
15	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	<b>43</b>
16	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	<b>47</b>
17	5	4	5	5	5	4	3	4	5	5	<b>45</b>
18	5	5	5	3	5	5	4	4	5	4	<b>45</b>
19	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	<b>47</b>
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>

## Lampiran 4

### FREQUENCY VARIABEL Y

#### Statistics

	Pengelolaan Keuangan Desa	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N	Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		1069	84	95	95	89	84	87	84	84	92	98	88

#### Frequency Table

#### Pengelolaan Keuangan Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	46	1	5.0	5.0
	47	1	5.0	10.0
	49	2	10.0	20.0
	50	2	10.0	30.0
	51	1	5.0	35.0
	52	3	15.0	50.0
	54	2	10.0	60.0
	56	3	15.0	75.0
	57	1	5.0	80.0
	59	2	10.0	90.0
	60	2	10.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	5	25.0	25.0	25.0
4	6	30.0	30.0	55.0
5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	5.0	5.0	5.0
4	3	15.0	15.0	20.0
5	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	5	25.0	25.0	25.0
5	15	75.0	75.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	10.0	10.0	10.0
4	7	35.0	35.0	45.0
5	11	55.0	55.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	5.0	5.0	5.0
3	3	15.0	15.0	20.0
4	7	35.0	35.0	55.0
5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	5.0	5.0	5.0
3	2	10.0	10.0	15.0
4	5	25.0	25.0	40.0
5	12	60.0	60.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	5.0	5.0	5.0
3	3	15.0	15.0	20.0
4	7	35.0	35.0	55.0
5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	5.0	5.0	5.0

3	3	15.0	15.0	20.0
4	7	35.0	35.0	55.0
5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	10.0	10.0	10.0
4	2	10.0	10.0	20.0
5	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	2	10.0	10.0	10.0
5	18	90.0	90.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	10.0	10.0	10.0
4	8	40.0	40.0	50.0
5	10	50.0	50.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**Y12**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	11	55.0	55.0	55.0

5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

## Lampiran 5

### FREQUENCY VARIABEL X

#### Statistics

	SPI	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
N Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Mis sing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	904	96	92	90	82	96	94	85	84	94	91

### Frequency Table

#### Sistem Pengendalian Internal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 42	2	10.0	10.0	10.0
43	3	15.0	15.0	25.0
44	3	15.0	15.0	40.0
45	5	25.0	25.0	65.0

46	2	10.0	10.0	75.0
47	2	10.0	10.0	85.0
48	1	5.0	5.0	90.0
50	2	10.0	10.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

### X1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	4	20.0	20.0	20.0
5	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

### X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	8	40.0	40.0	40.0
5	12	60.0	60.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

### X3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	10.0	10.0	10.0
4	6	30.0	30.0	40.0
5	12	60.0	60.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

#### X4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	5	25.0	25.0	25.0
4	8	40.0	40.0	65.0
5	7	35.0	35.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

#### X5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	4	20.0	20.0	20.0
5	16	80.0	80.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

#### X6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	6	30.0	30.0	30.0
5	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

### X7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	20.0	20.0	20.0
4	7	35.0	35.0	55.0
5	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

### X8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	20.0	20.0	20.0
4	8	40.0	40.0	60.0
5	8	40.0	40.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**X9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	6	30.0	30.0	30.0
5	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**X10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	9	45.0	45.0	45.0
5	11	55.0	55.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

## Lampiran 6

### OUTPUT REGRESSION

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pengendalian Internal <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 <sup>a</sup>	.198	.154	3.964

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	70.056	1	70.056	4.458	.049 <sup>a</sup>
	Residual	282.894	18	15.716		
	Total	352.950	19			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.843	17.835		.888	.386
	Sistem Pengendalian Internal	.832	.394	.446	2.111 .049

a. Dependent Variable: Pengelolaan  
Keuangan Desa

## Lampiran 7

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail:[lembatapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembatapenelitian@unisan.ac.id)

No.:19185/PIP/LEMLIT-UNISAN/VII/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Marwin S Hasan
NIM : E2119237
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa
Judul penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhuadaa

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 02 Juli 2021

  
Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104

Scanned by TapScanner

## Lampiran 8

### SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO  
KECAMATAN DUHIADAA  
DESA MEKAR JAYA

Alamat : Jln. Trans UPT Desa Mekar Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato

**SURAT BALASAN PENELITIAN MAHASISWA**

NOMOR : 141 / DMJ-Dhd / / VII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUHARTO KAHALA
Jabatan	: Kepala Desa Mekar Jaya
Alamat	: Desa Mekar Jaya Kec. Duhiadaa Kab.Pohuwato

Menugaskan kepada mahasiswa tersesebut dibawah ini :

Nama	: MARWIN S. HASAN
Nim	: E2119237
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan	: Manajemen

Yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas sistem Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa".

Mekar Jaya, 20 Juli 2021  
KEPALA DESA MEKAR JAYA

SUHARTO KAHALA

## Lampiran 9

### SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN UNIVERSITAS ICHSAN (UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

#### SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0982/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MARWIN S. HASAN  
NIM : E2119237  
Program Studi : Manajemen (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Efektivitas sistem intern terhadap pengelolaan keuangan desa Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 November 2021  
Tim Verifikasi,



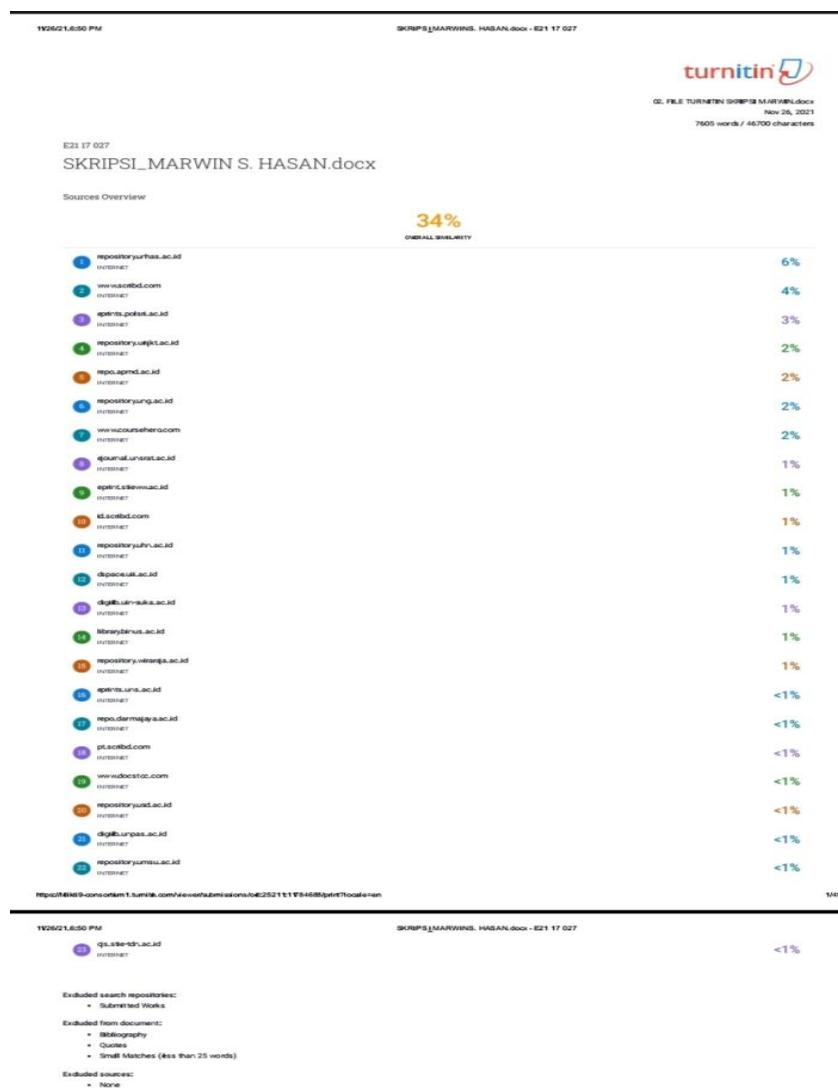
Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

#### Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

## Lampiran 10

### HASIL TURNITIN



## Lampiran 11

### CURRICULUM VITAE



#### 1. Identritas Pribadi

Nama : Marwin S. Hasan  
NIM : E21.19.237  
Tempat/TglLahir : Marisa, 16 April 1999  
JenisKelamin : Perempuan  
Angkatan : 2019  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Manajemen  
Konsentrasi : Keuangan  
Alamat : Desa Taluduyunu Utara,  
Kecamatan Buntulia Kabupaten  
Pohuwato

#### 2. Riwayat Pendidikan

##### Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 03 DUHIADAA pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di MTS NEGERI MODEL LIMBOTO padatahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di MA ALMUBARAK pada tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.